

## **BAB VI**

### **SARAN**

Saran yang dapat diberikan selama menempuh PKPA di Apotek Kimia Farma 638 Puri Indah adalah sebagai berikut.

1. Apoteker harus lebih rajin dalam menerapkan pelayanan, meningkatkan pencatatan *patient medication record* yang sangat penting untuk merangkum pengobatan dan perkembangan kesehatan pasien.
2. Pemberian KIE kepada pasien harus lebih ditingkatkan lagi, bukan hanya tentang cara penggunaan obat, interaksi obat dan penyimpanan. Apoteker juga harus melakukan KIE terkait terapi non farmakologis dan pencatatan data pribadi pasien untuk menghindari kesalahan saat KIE.
3. Apotek Kimia Farma 638 hendaknya memperkerjakan juru resep mengingat banyaknya resep yang masuk pada saat tertentu.
4. Asisten apoteker dan APA harus lebih teliti dalam melakukan pencatatan kartu stok untuk menghindari terjadinya ketidakcocokan antara stok fisik, kartu stok, maupun stok di komputer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anief, M. 2005, *Manajemen Farmasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1993. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2002. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang *Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2004. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 Tentang *Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang *Pekerjaan Kefarmasian*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementrian Kesehatan Republik Indoneisa, 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang *Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementrian Kesehatan Republik Indoneisa, 2017. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang *Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2011. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2011 tentang *Registrasi Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2011. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor : TU.08.03/IV/1400/2011 tentang *Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2015. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang *Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan*

- Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Lacy, C.F. *et al.* 2008. *Drug Information Handbook* 17TH Edition. American Pharmacist Association, USA.
- McEvoy, Gerald K., *et al.*, 2011, *AHFS Drug Information*, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- Menkes RI, 2010, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor*, Menteri Kesehatan, Jakarta.
- Menkes RI, 2015, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Menteri Kesehatan, Jakarta.
- Menkes RI, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menkes RI, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor No. 31 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor No. 889/ MENKES/ PER/ V/ 2011 Tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Menteri Kesehatan, Jakarta.
- Menkes RI, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*, Menteri Kesehatan, Jakarta.

- Menkes RI, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika*, Menteri Kesehatan, Jakarta.
- Menkes RI, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika*, Menteri Kesehatan, Jakarta.
- MIMS Indonesia, 2016. MIMS Petunjuk Konsultasi Edisi 16, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 919 Tahun 1993 tentang *Kriteria Obat yang Dapat diserahkan Tanpa Resep*
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2014, *Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2016, *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Sweetman, S.C., 2009, *Martindale: The Complete Drug Reference 36th ed.*, Pharmaceutical Press, London.
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 *Tentang Narkotika*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 *Tentang Kesehatan*. Jakarta: Republik Indonesia.